

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Organisasi merupakan sehimpunan orang yang melaksanakan suatu bentuk kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu (Tanjung et al., 2022). Jenis organisasi salah satunya mencakup organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba diartikan sebagai organisasi yang dalam kegiatan utamanya tidak menitikberatkan fokusnya pada perolehan laba (Faiz, 2020). Organisasi ini berfokus untuk melaksanakan berbagai aktivitas di bidang sosial atau kemanusiaan (Putri & Ayem, 2021). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyusun klasifikasi internasional terkait organisasi nirlaba yang salah satunya mencakup kelompok pendidikan dan penelitian (Faiz, 2020). Tingkat pendidikan di Indonesia berawal dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), kemudian dilanjutkan dengan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, dan berakhir di Pendidikan Tinggi.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) didefinisikan sebagai lembaga yang sangat mendasar dalam bidang pendidikan guna menyediakan kerangka dasar pembentukan dan pengembangan sikap, serta berbagai dasar pengetahuan dan keterampilan (Sapriani, 2019). Salah satu bentuk PAUD adalah taman kanak-kanak (TK). TK merupakan jenis PAUD yang melakukan program di bidang pendidikan anak usia empat hingga enam tahun (Amelia & Wulandari, 2022).

Taman kanak-kanak sebagai lembaga pendidikan formal menjadi objek penelitian yang menarik melihat dari sisi pertumbuhannya.

**Tabel 1. 1 Perkembangan Jumlah
Taman Kanak-Kanak di Indonesia**

Tahun Ajaran	Negeri	Swasta	Jumlah Sekolah
2020/2021	4.093	85.952	90.045
2021/2022	4.550	86.817	91.367
2022/2023	4.976	88.409	93.385
2023/2024	5.667	89.831	95.498
2024/2025	6.709	89.929	96.638

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2021), Badan Pusat Statistik Indonesia (2022), Badan Pusat Statistik Indonesia (2023), Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), dan Badan Pusat Statistik Indonesia (2025)

Merujuk pada tabel 1.1, dapat dilihat dalam jangka waktu lima tahun terakhir jumlah TK di Indonesia mengalami perkembangan secara berturut-turut. Sejalan dengan data tersebut, DKI Jakarta sebagai salah satu kota besar di Indonesia, juga memiliki TK yang mengalami perkembangan.

**Tabel 1. 2 Perkembangan Jumlah
Taman Kanak-Kanak di DKI Jakarta**

Tahun Ajaran	Negeri	Swasta	Jumlah Sekolah
2022/2023	79	1.794	1.873
2023/2024	79	1.812	1.891
2024/2025	79	1.807	1.886

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia (2023), Badan Pusat Statistik Indonesia (2024), dan Badan Pusat Statistik Indonesia (2025)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah TK yang berada di DKI Jakarta juga mengalami perkembangan di tahun ajaran 2023/2024. Walaupun di tahun ajaran berikutnya, 2024/2025, mengalami penurunan tetapi tidak signifikan. Selain itu, berdasarkan data tersebut dapat terlihat bahwa pihak swasta berkontribusi besar dalam peningkatan jumlah TK ini, terlihat dengan banyaknya sekolah yang dikelola oleh swasta, baik dilihat secara keseluruhan wilayah di Indonesia maupun khusus wilayah DKI Jakarta.

Berbagai hal ini mencerminkan bahwa kesadaran masyarakat meningkat, baik dari sisi pendiri maupun orang tua, mengenai pentingnya menempuh pendidikan di TK sebelum menempuh pendidikan selanjutnya.

Tak hanya itu, perkembangan TK ini juga menunjukkan bahwa layanan jasa pendidikan anak ini akan terus berlanjut. Terutama saat ini, dengan adanya Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang mencakup perubahan kebijakan wajib belajar yang awalnya 12 tahun menjadi 13 tahun, terdiri dari satu tahun prasekolah dan 12 tahun untuk pendidikan sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) (Yulianti, 2023). Kemudian, dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (2025) dijelaskan bahwa salah satu arah kebijakan guna mewujudkan pendidikan berkualitas yang merata adalah percepatan wajib belajar 13 tahun, satu tahun untuk pendidikan prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan menengah. Melihat hal ini, ke depannya TK ataupun jenis prasekolah lainnya akan menjadi salah satu fokus penting bagi pemerintah untuk peningkatannya baik dari sisi kuantitas maupun kualitasnya.

Sebagai institusi yang bergerak di bidang pendidikan anak, TK melibatkan proses keuangan dalam aktivitas operasionalnya. Pada suatu gugus TK di provinsi Riau bentuk penerimaan kas berupa penerimaan tiap bulannya dari iuran sumbangan pembantu penyelenggaraan (SPP) murid, penerimaan dari pemerintah berupa dana Bantuan Operasional

Penyelenggaraan PAUD (BOP PAUD), serta penerimaan pendaftaran dan infak dari orang tua/wali murid. Sementara itu, bentuk pengeluaran kasnya mencakup berbagai beban seperti beban gaji tenaga pendidik, listrik, air, peralatan, perlengkapan sekolah, dan lainnya (Samsiah et al., 2022).

Bentuk tersebut sejalan dengan penerapan pada beberapa TK di Jawa Barat yang di mana bentuk penerimaan kasnya berasal dari murid dan pemerintah. Kemudian, bentuk pengeluarannya seperti pembelian perlengkapan sekolah dan penggajian (Maulana et al., 2024). Dengan ini, dapat terlihat bahwa secara garis besar penerimaan di TK dapat berasal dana yang diterima dari masyarakat dalam hal ini murid dan pemerintah. Kemudian, bentuk pengeluaran TK berhubungan dengan kelangsungan sekolah.

Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya terdapat kendala yang dialami oleh TK terkait dengan pengelolaan keuangannya. Salah satu TK di Mataram mengalami kendala bahwa pengelolaan keuangannya belum seluruhnya tepat dan pemahaman akan pelaporan keuangan yang selaras dengan standar akuntansi keuangan (SAK) juga belum memadai (Sasanti et al., 2020). Selain itu, yayasan PAUD dan TK di kota Padang juga mengalami kendala, yakni pencatatan keuangannya masih manual dan belum selaras dengan standar keuangan yang berlaku. Sekolah masih memanfaatkan buku dalam melakukan pencatatan keuangannya serta pelaporan keuangan secara periodik belum dilaksanakan. Hal ini menjadi kendala karena di satu sisi guna meningkatkan fasilitas sekolah

membutuhkan sokongan dana dari keuangan yayasan sehingga memerlukan manajemen keuangan dan administrasi yang selaras dengan standar keuangan serta akuntabel (Hatta et al., 2018).

Permasalahan pengelolaan keuangan juga dialami oleh sembilan belas PAUD/TK di lingkungan pimpinan cabang salah satu organisasi di Jawa Tengah. Kendala yang dialami adalah belum seragamnya pencatatan keuangan, artinya belum ada format baku yang dapat dijadikan pedoman dalam melakukan pencatatan. Hal ini akan berdampak pada informasi yang beragam yang membuat tingkat validitas dan realibilitas dari informasi tersebut menjadi tidak informatif dan tingkat transparansinya juga menjadi berlainan padahal tipe penerimaan dan pengeluarannya nyaris sama (Trisnawati et al., 2022).

Permasalahan yang terjadi pada penyelenggaraan TK tak hanya terkait dengan pencatatan dan pelaporan keuangannya, tetapi juga mencakup kasus korupsi dana pemerintah yang terjadi pada PAUD/TK, yang perlu mendapatkan perhatian. Dilansir dari Detikzone.net terdapat oknum kepala sekolah suatu PAUD di Jawa Timur yang diduga kuat telah melakukan tindak pidana dana BOP PAUD yang besarnya sungguh besar yang realisasinya tidak dilakukan dengan transparan. Dalam berita tersebut dinyatakan bahwa orang tua murid tidak mengetahui bahwa PAUD tersebut mendapatkan sokongan dana dari pemerintah dan bahkan mereka dibebankan biaya pembelian seragam dan buku. Selain itu, arena permainan murid di sekolah tersebut juga tidak tersedia (Sakti, 2024).

Kasus selaras juga terjadi pada salah satu taman kanak-kanak di Riau. Media tertulis Japos.Co menyatakan bahwa kepala TK tersebut diduga kuat bahwa dana BOP PAUD tidak direalisasikan secara transparan. Kecurigaan masyarakat muncul ketika kepala TK menyatakan bahwa dana BOP yang diperoleh belum cukup untuk memelihara sarana prasarana sekolah yang tidak dalam kondisi maksimal dan mengganti yang rusak. Selain itu, orang tua murid tidak pernah mengetahui bahwa ada dana pemerintah yang diterima oleh TK. Dalam berita tersebut disampaikan juga bahwa orang tua murid dibebankan biaya SPP per bulannya dan biaya pendaftaran, bahkan pemberian asupan gizi anak yang disebutkan dalam petunjuk teknis BOP tidak dirasakan. Ketika melihat juga kondisi di lapangan, salah satunya, arena bermain anak tidak terawat (Japos.Co, 2023).

Berbagai masalah yang dialami TK dalam mengelola keuangannya menjadi daya tarik bagi peneliti untuk menetapkan TK sebagai subjek penelitian ini. Hal ini merujuk pada perkembangan TK selama beberapa tahun terakhir dan sebagai salah satu lembaga pendidikan prasekolah yang akan diwajibkan untuk ditempuh oleh masyarakat yang menunjukkan bahwa entitas ini akan terus berlanjut. Selain itu, TK juga mendapatkan dana dari masyarakat dan pemerintah yang memerlukan pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber dayanya tetapi dalam pelaksanaannya TK mengalami kendala. Oleh sebab itu, berbagai masalah yang terjadi pada TK perlu diberikan solusi penyelesaian agar tiap entitas dapat tetap melanjutkan usahanya serta mampu mewujudkan akuntabilitasnya.

Menurut penelitian terdahulu solusi atas kendala yang dialami TK terkait pencatatan yang masih manual, tidak seragam, dan tidak selaras dengan standar akuntansi keuangan dapat diselesaikan dengan memberikan penyuluhan terkait laporan keuangan, standar akuntansi yang dipakai, tujuan laporan keuangan, sistem pencatatan akuntansi, memberikan keterampilan terkait Microsoft Excel, serta melakukan simulasi penyusunan laporan keuangan kepada pengelola TK (Sasanti et al., 2020). Sementara itu, menurut Trisnawati et al. (2022) dapat diberikan penyelesaian dengan melewati beberapa tahapan, yaitu tahap sosialisasi dan persiapan, tahap penyusunan panduan pencatatan secara manual dan digital (Excel), kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pelatihan kepada bendahara TK, serta evaluasi dan monitoring.

Sementara itu, guna mencegah terjadinya korupsi dana pendidikan di TK maka hasil penelitian yang dilakukan Alfrieda et al. (2024) menghasilkan perancangan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan dan pengeluaran kas sebagai solusi atas adanya rangkap jabatan dalam sekolah, proses transaksi penerimaan dan pengeluaran sekolah yang belum berbasis digital, serta tidak optimalnya pengendalian internal pada TK ABC. Penelitian tersebut juga selaras dengan hasil penelitian milik Febriani et al. (2024), yakni penelitian yang menghasilkan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerimaan dan pengeluaran kas sebagai solusi kondisi salah satu TK di Pondok Gede yang belum memiliki

rekening sekolah, yang di mana hal ini dapat mengurangi transparansi dan efisiensi administrasi.

Penelitian ini akan berfokus pada kebutuhan suatu taman kanak-kanak di Jakarta Pusat terkait dengan pengelolaan keuangan khususnya dalam proses penerimaan dan pengeluaran kasnya. TK Cahaya Mutiara adalah institusi pendidikan bagi anak usia dini yang berlokasi di Jakarta Pusat. Hasil pra-wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak sekolah, yaitu Kepala Sekolah TK Cahaya Mutiara, diperoleh informasi bahwa sekolah ini sudah berdiri sejak tahun 2009. Dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya sekolah ini melibatkan satu kepala sekolah sebagai pimpinan sekolah, tiga tenaga pendidik sebagai pengajar murid, dan satu administrator.

Perjalanan institusi ini sudah terhitung 16 tahun dalam melakukan operasionalnya di bidang pendidikan anak. Namun, baru di tahun 2021 TK Cahaya Mutiara terdata secara resmi di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Berdasarkan wawancara pra-riset dengan kepala sekolah, disampaikan bahwa penerimaan murid baru di TK Cahaya Mutiara mengalami pasang surut, artinya ada saatnya meningkat dan ada saatnya menurun tetapi sampai pada saat ini sekolah masih tetap berdiri dan mampu menjalankan usahanya. Selain itu, kepala sekolah juga menyampaikan bahwa ada rencana untuk melakukan ekspansi. Berbagai hal ini menunjukkan bahwa TK Cahaya Mutiara akan terus melanjutkan dan mempertahankan usahanya.

Berdasarkan pra-riset tersebut, ditemukan adanya kendala yang terjadi pada TK Cahaya Mutiara, yakni pencatatan keuangan yang dilakukan sekolah belum sesuai dengan kaidah pencatatan akuntansi. Selain itu, proses penerimaan dan pengeluaran kas sekolah juga masih sederhana dan perlu perbaikan, terlihat dari kepala sekolah yang terlibat dalam proses keuangan sekolah dan kurangnya ketersediaan dokumen bukti transaksi pengeluaran. Hal ini dipicu karena pihak sekolah tidak memiliki latar belakang akuntansi.

Dengan melihat kondisi ini, maka peneliti menyadari kebutuhan sekolah untuk mempunyai pedoman akuntansi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait penerimaan dan pengeluaran kas. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (2008) menerangkan bahwa "realisasi penerimaan dan pengeluaran dana pendidikan satuan pendidikan dibukukan dan dilaporkan sesuai standar akuntansi keuangan nirlaba yang berlaku bagi satuan pendidikan". Peraturan tersebut memberikan makna bahwa TK sebagai salah satu bentuk satuan pendidikan juga ikut melakukan pembukuan dan pelaporan selaras dengan standar yang berlaku. Standar akuntansi keuangan nirlaba sebelumnya dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) tetapi per 1 Januari 2025 standar tersebut digantikan oleh SAK Indonesia untuk Entitas Privat (EP). Selain dari standar tersebut, entitas nirlaba dalam menyajikan laporan keuangannya juga menggunakan ISAK 335: Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nonlaba.

Dengan adanya pedoman akuntansi, diharapkan pihak sekolah dapat lebih mudah memahami bagaimana mencatat dan menyusun laporan keuangannya selaras dengan standar yang ada serta karakteristik usahanya. Pedoman akuntansi ini akan memuat penjelasan yang ringkas terkait bagaimana definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas berbagai akun sehubungan dengan penerimaan dan pengeluaran kas TK. Selain itu, dalam pedoman ini juga akan mencakup ilustrasi pencatatan atas transaksi yang sesuai dengan kaidah akuntansi serta format Excel penjurnalan.

Selain itu, melihat proses penerimaan dan pengeluaran kas sekolah yang sederhana dan pengendalian internal yang belum diaplikasikan sepenuhnya pada entitas maka penelitian ini juga akan merancang SOP sebagai jawaban atas permasalahan tersebut. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk memberikan solusi atas masalah pada sekolah dengan melakukan penelitian terkait **"Rancangan Pedoman Akuntansi dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Pada Taman Kanak-Kanak Cahaya Mutiara"**. Dengan adanya *output* ini diharapkan dapat membantu TK sebagai satuan PAUD untuk menerapkan tata kelola layanan yang baik, salah satunya dengan adanya kejelasan struktur organisasi dan adanya dokumen keuangan sebagai bentuk akuntabilitasnya (Trimuliani, 2021). Kebutuhan ini akan dirancang dengan menggunakan hasil penelitian serupa sebagai referensi perancangan

mengingat latar belakang kepala sekolah yang tidak berasal dari bidang akuntansi.

B. Pertanyaan Penelitian

Merujuk pada uraian masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka peneliti menentukan pertanyaan penelitian yang terdiri dari:

1. Bagaimana rancangan pedoman akuntansi terkait penerimaan dan pengeluaran kas pada Taman Kanak-Kanak Cahaya Mutiara Jakarta Pusat?
2. Bagaimana rancangan Standar Operasional Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada Taman Kanak-Kanak Cahaya Mutiara Jakarta Pusat?

C. Tujuan Penelitian

Dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian sebelumnya, maka ditetapkan tujuan penelitian berikut:

1. Merancang pedoman akuntansi terkait penerimaan dan pengeluaran kas pada Taman Kanak-Kanak Cahaya Mutiara Jakarta Pusat.
2. Merancang Standar Operasional Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas pada Taman Kanak-Kanak Cahaya Mutiara Jakarta Pusat.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat dari sisi teoritis maupun praktisnya, yaitu:

1. Manfaat Teoretis

- a. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya dalam merancang pedoman akuntansi dan SOP terkait penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan teori penyusunan pedoman akuntansi dan SOP.
- b. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber literatur bagi peneliti selanjutnya yang meneliti topik serupa terkait pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas di organisasi nirlaba.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi TK Cahaya Mutiara

Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi TK Cahaya Mutiara dalam mengelola keuangannya khususnya mengelola penerimaan dan pengeluaran kasnya guna meningkatkan akuntabilitas.

- b. Bagi TK Sejenis

Diharapkan penelitian ini dapat disampaikan kepada dinas pendidikan, sehingga selanjutnya dapat diaplikasikan oleh TK sejenis yang memiliki karakteristik yang sama, yakni TK swasta, sebagai panduan dalam mengelola penerimaan dan pengeluaran kasnya sebagai wujud akuntabilitasnya.

- c. Bagi Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,

Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah dalam memastikan bahwa sekolah sudah mewujudkan akuntabilitas dalam mengelola keuangannya.

